

Analisis Perbandingan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Konflik Israel-Palestina pada Era Pemerintahan Barack Obama (2009-2017) dan Donald Trump (2017-2021)

Waode Fatimah Azzahra, Asep Kamaluddin Nashir

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
e-mail: asepkamaluddin@upnvj.ac.id

Abstract

The United States, under the administrations of Barack Obama and Donald Trump, demonstrated stark differences in their foreign policy approaches to the Israel–Palestine conflict. Obama emphasized a normative and persuasive strategy by supporting the two-state solution as a means to bring both parties to the negotiating table. In contrast, Trump adopted a more aggressive and controversial approach, exemplified by the launch of Trump's Peace Plan and the relocation of the U.S. Embassy to Jerusalem. This research aims to compare the foreign policy directions of both presidents, with a particular focus on how internal factors and idiosyncratic characteristics shaped their decision-making processes. Using a qualitative approach and the idiosyncratic theory as the analytical framework, the research examines each leader's background, leadership style, and policy preferences. The findings suggest that Obama tended to favor multilateralism and diplomacy, while Trump prioritized a more transactional approach. The research concludes that idiosyncratic factors played a significant role in shaping the United States' foreign policy approach to the Israel–Palestine conflict.

Keywords: *idiosyncrasy, Israel-Palestine Conflict, Obama, Trump's Peace Plan, two-state solution, US Foreign Policy.*

Abstrak

Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama dan Donald Trump menunjukkan perbedaan mencolok dalam pendekatan kebijakan luar negeri

terhadap konflik Israel-Palestina. Obama menekankan pendekatan normatif dan persuasif melalui dukungan terhadap solusi dua negara (*two-state solution*), sementara Trump mengambil langkah agresif dan kontroversial, seperti peluncuran *Trump's Peace Plan* serta pemindahan kedutaan besar AS ke Yerusalem. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan luar negeri kedua presiden AS tersebut dengan menekankan pada bagaimana faktor internal dan karakteristik idiosinkretik memengaruhi perbedaan pengambilan keputusan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kerangka teori idiosinkratik, penelitian ini menganalisis latar belakang, gaya kepemimpinan, dan preferensi kebijakan masing-masing pemimpin. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Obama cenderung mengedepankan multilateralisme dan diplomasi, sementara Trump memprioritaskan pendekatan yang bersifat transaksional. Penelitian ini menegaskan bahwa faktor idiosinkratik memiliki pengaruh signifikan terhadap pendekatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap konflik Israel-Palestina.

Kata kunci: idiosinkratik, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat, konflik Israel-Palestina, Obama, *Trump's Peace Plan*, *two-state solution*.

Pendahuluan

Barack Obama dan Donald J. Trump merupakan dua presiden Amerika Serikat (AS) yang memiliki latar belakang, pengalaman, dan karakteristik kepemimpinan yang sangat kontras. Obama datang dari latar belakang akademis dan hukum, serta dikenal karena pendekatan multilateral dan diplomatiknya, sementara Trump berasal dari dunia bisnis dan menampilkan gaya kepemimpinan yang lebih langsung, konfrontatif, dan nasionalistik (Darmawan & Utami, 2024; Immelman & Griebie, 2020; Forgey, 2018; PBS News Hour, 2017). Perbedaan ini menjadi titik masuk penting untuk memahami bagaimana karakter personal dan preferensi politik masing-masing pemimpin memengaruhi kebijakan Amerika Serikat terhadap konflik Israel-Palestina. Penelitian ini menganalisis perbedaan kebijakan luar negeri pemerintahan Obama yang berlangsung selama dua periode dari 2009 sampai 2017, dengan pemerintahan Trump pada periode pertama dari 2017 sampai 2021.

Terpilihnya Obama sebagai presiden kulit hitam pertama yang memiliki garis keturunan muslim membawa harapan besar bagi umat muslim dunia, termasuk Palestina untuk memberikan bantuan dalam penyelesaian konfliknya dengan Israel. Obama berjanji akan memberikan perhatian besar terhadap nasib rakyat Palestina dan kemerdekaan negaranya. Di sisi lain, Obama juga berjanji kepada kaum Yahudi di AS

untuk menjamin keamanan dan koeksistensi Israel (Obama, 2015; Elgot, 2009). Berdiri di antara dua janji yang saling bertolak belakang, komitmen ganda ini menciptakan dilema kebijakan luar negeri yang menuntut keseimbangan antara prinsip keadilan dan kepentingan domestik.

Beberapa penelitian terdahulu telah menganalisis upaya-upaya Obama dan Trump dalam menghadapi konflik Palestina-Israel (Sebayang, 2020; Munayyer, 2020; Pressman, 2016; Paat, 2013). Pada masa kepemimpinan Barack Obama, AS secara garis besar masih menggunakan pendekatan yang sama dengan pendekatan yang digunakan para pemimpin terdahulu, yakni dengan memanfaatkan power sebagai negara adidaya untuk memaksa Israel membuat konsesi besar. Fokus utama pada awal masa jabatannya tahun 2009 adalah permintaan agar Israel membekukan pembangunan permukiman di Tepi Barat. Namun, pendekatan ini menghadapi hambatan serius, terutama akibat penolakan dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Meskipun sempat disepakati pembekuan terbatas selama sembilan bulan, upaya lanjutan seperti proposal pembekuan 90 hari dengan imbalan jet tempur F-35 kembali gagal menghasilkan komitmen jangka panjang (Pressman, 2016).

Upaya AS dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel dijalankan melalui mekanisme negosiasi langsung (Direct Negotiation Between Israel and Palestinians) yang dilaksanakan pada 2 September 2010. Mediasi atas prakarsa ini dijalankan melalui forum tripartit yang terdiri dari tiga perwakilan, yaitu Presiden AS Barack Obama sebagai fasilitator negosiasi langsung, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai perwakilan dari Israel, dan Mahmoud Abbas sebagai perwakilan dari ketua otoritas Palestina. Tujuan akhir dari perundingan ini adalah untuk mencapai "final status settlement" secara resmi untuk mengatasi konflik yang terjadi antara kedua negara dengan menerapkan two-state solution yang mengatur Israel agar tetap menjadi sebuah negara Yahudi, serta pembentukan negara untuk rakyat Palestina (Paat, 2013). Sebelum negosiasi tersebut terealisasi, Obama sebenarnya telah melakukan beberapa kali pertemuan empat mata dengan masing-masing pemimpin dari Israel, maupun Palestina. Misalnya, pertemuan Presiden Barack Obama dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada 25 Maret 2010 dan 10 September 2010 di Washington DC. Obama pun sempat menghubungi Presiden Mahmoud Abbas melalui telepon pada 10 Juli 2010 untuk membahas prakarsa AS dalam mewujudkan kehidupan masyarakat Palestina dan Israel yang berdampingan (SBS News, 2015).

Berbeda dengan konsep pendekatan yang dilakukan Obama, Donald J. Trump pada masa kepemimpinannya menunjukkan pendekatan yang lebih agresif di Timur Tengah (Munayyer, 2020; Baylis, Smith, & Owens, 2020). Pascapelantikan Donald J. Trump sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat, babak baru terkait proses perdamaian

Israel dan Palestina telah dibuka. Trump menjadikan agenda itu sebagai prioritas utama dalam semester pertama kepemimpinannya. Dalam pidato kampanye kepresidenannya, Trump mengatakan bahwa ia memiliki 'ultimate deal' sebagai rangkaian rencana mengakhiri konflik Palestina-Israel. Namun, peristiwa yang terjadi pada 6 Desember 2017 menunjukkan Trump justru mengumumkan pengakuan terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel, disertai pemindahan kedutaan AS. Kebijakan ini memicu banyak sekali kritik dari publik internasional, seperti Liga Arab, International Court of Justice, Uni Eropa, dan lainnya. Berdasarkan polling Gallup International Association, tercatat ada sebesar 71% masyarakat internasional yang menolak kebijakan Trump tersebut. Namun seolah menutup mata dan telinga terhadap banyaknya kecaman dari publik internasional, AS di bawah kepemimpinan Trump justru menutup konsulatnya untuk Palestina di Yerusalem Timur.

Selanjutnya, pada 10 September 2018, pemerintahan Trump mengumumkan penutupan Kantor Delegasi Umum Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington DC yang merupakan hasil dari Perjanjian Oslo periode 1993-1995. Di tahun yang sama, Trump juga menghentikan seluruh bantuan pendanaan Amerika Serikat kepada Badan Bantuan dan Pembangunan PBB (UNRWA). Pada tahun berikutnya, dalam Konferensi Bahrain yang dilaksanakan pada 25-26 Juni 2019, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump mengusulkan sebuah proposal perdamaian konflik Israel dan Palestina yang dikenal sebagai "Deal of the Century". Proposal ini secara resmi diperkenalkan sebagai "Peace to Prosperity" kepada publik internasional pada 28 Januari 2020 melalui sebuah konferensi pers di Gedung Putih. Serangkaian inisiatif ini kemudian dikenal dengan sebutan Trump Peace Plan. Secara garis besar, proposal damai yang diusulkan oleh Trump ini masih mencakup hal-hal yang lebih dekat dengan keinginan Israel, seperti Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel, Israel akan mempertahankan semua pemukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat, Israel akan mengendalikan keamanan dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania, serta Palestina tidak akan diakui sebagai negara independen secara langsung, melainkan setelah empat tahun (Sebayang, 2020). Selain itu, Proposal Trump juga mengusulkan bahwa Israel akan mempertahankan tanggung jawab keamanan utama bagi Palestina di masa depan, di mana wilayah Gaza akan didemiliterisasi secara penuh.

Terdapat banyak analisis yang mengemukakan bahwa ada dua garis realistik ketika membahas terkait konflik Israel-Palestina serta upaya penyelesaiannya. Dua faktor tersebut adalah AS dan Israel. Para pengamat Timur Tengah beranggapan bahwa AS menjadi penghambat utama dari proses perdamaian Israel dan Palestina melalui resolusi konflik yang dibentuk oleh PBB. Hal tersebut dibuktikan secara langsung melalui banyaknya veto yang dijatuhkan AS pada resolusi PBB. Tercatat ada 41 dari 82 veto yang

dikeluarkan oleh AS merupakan dukungan terhadap Israel terkait konflik Israel-Palestina. Selain itu AS juga memilih abstain pada resolusi 1860 tentang penghentian kekerasan di Gaza. Serta dari 175 resolusi DK PBB tentang Israel, ada 97 menentang, 74 netral, dan 4 mendukung Israel, tentunya hal tersebut diluar dari resolusi yang dijatuhi veto oleh AS.

Hal ini menunjukkan bahwa sikap AS yang tidak netral menjadi salah satu faktor kegagalan dari upaya penyelesaian konflik antara Israel-Palestina selama beberapa dekade terakhir (Firdaus & Yani, 2020). Namun, dibalik itu, pergantian kepemimpinan AS dari tangan Obama ke tangan Trump ternyata membawa perubahan pendekatan kebijakan luar negeri negara tersebut terhadap konflik Israel-Palestina. Meskipun berada pada garis poros yang sama, yakni keberpihakan terhadap Israel, pendekatan yang dilakukan oleh kedua Presiden AS tersebut memiliki perbedaan yang sangat kontras.

Obama dalam kepemimpinannya menggunakan pendekatan yang mengedepankan tindakan secara persuasif dan normatif, dengan mengupayakan jalur diplomasi demi menciptakan perdamaian antara kedua negara yang berkonflik. Sementara itu gaya kepemimpinan Trump telah memberikan perubahan yang sangat drastis dalam model kebijakan Amerika Serikat terkait upaya perdamaian Israel dan Palestina. Hal tersebut menunjukkan sikap keras Trump yang bertentangan dengan nilai perdamaian yang sesungguhnya, seolah Trump menutup jalan yang telah dibuka sebelumnya. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan idiosinkratik, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana faktor-faktor internal, terutama latar belakang psikologis, pengalaman politik, dan jejaring sosial, yang membentuk pendekatan kebijakan luar negeri masing-masing presiden dalam merespons konflik Israel-Palestina.

Idiosinkratik dalam Kebijakan Luar Negeri

Berangkat dari perubahan pendekatan kebijakan luar negeri AS dari era pemerintahan Barack Obama ke Donald Trump, tentu ada beberapa faktor yang memengaruhinya. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan pendekatan idiosinkratik untuk memahami perbedaan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap konflik Israel-Palestina pada era pemerintahan Barack Obama dan Donald Trump. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa karakteristik personal seorang pemimpin memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam formulasi dan implementasi kebijakan luar negeri.

Dalam Hubungan Internasional, pendekatan idiosinkratik sering kali diasosiasikan dengan tingkat analisis individual. Pendekatan ini secara khusus memandang bahwa keputusan politik merupakan produk dari karakter personal, sistem kepercayaan, pengalaman hidup, hingga afiliasi politik seorang. Dengan kata lain, konfigurasi psikologis individu memainkan peranan penting terhadap arah dan konten dari keputusan politik yang dibuat.

Menurut H. C. Warren, idiosinkratik mencakup keseluruhan pengaturan mental individu termasuk, kepribadian, intelektualitas, keahlian moral, dan sikap yang telah dibangun pada setiap fase perkembangan hidupnya. Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian dalam pendekatan ini adalah dimensi kepribadian politik. Herman dan Falkowski merumuskan sejumlah karakteristik yang dapat merefleksikan kepribadian politik seseorang, antara lain: high nationalism, high belief in own control, high need for affiliation, high conceptual complexity, high distrust of others, dan high need for power, serta variasi sebaliknya (low nationalism, dan seterusnya). Pengaturan mental semacam ini membentuk kerangka kepribadian politik yang berbeda antara satu individu dengan yang lain, termasuk antara Barack Obama dan Donald Trump dalam menyikapi konflik Israel-Palestina. Dengan demikian, diferensiasi dalam pengaturan mental dan kepribadian tersebut akan menghasilkan orientasi kebijakan luar negeri yang berbeda secara substantif.

Faktor idiosinkratik sebagai faktor psikologis yang mempengaruhi pemimpin terdiri dari empat aspek kunci. Pertama, aspek yang terkait dengan asal usul keluarga, yang mencakup status sosial, keadaan ekonomi, serta interaksi sosial dengan masyarakat. Kedua, aspek pendidikan yang mencerminkan perjalanan akademis seorang pemimpin dari tingkat dasar hingga pendidikan tertinggi, termasuk di dalamnya pendidikan non-formal. Ketiga, aspek pengalaman dan pelajaran hidup yang dimiliki oleh pemimpin, yang merupakan hasil dari dinamika kehidupannya di masyarakat. Keempat, aspek afiliasi elit, yang menempatkan partai politik sebagai instrumen utama demokrasi di dalam sistem politik, di mana pandangan elit terbentuk berdasarkan ideologi dan kepentingan yang diusung oleh partai yang mendukung pemimpin tersebut.

Untuk memahami karakteristik idiosinkratik yang dimiliki oleh Barack Obama dan Donald Trump, diperlukan pendekatan psychobiography yang berfungsi untuk mengklasifikasikan tipe kepribadian kedua pemimpin tersebut. Penelitian mengenai psychobiography telah dilakukan sejak tahun 1920 dengan tujuan untuk menggali karakter dan sifat personal individu, serta mengidentifikasi motif atau dorongan psikologis di balik tindakan politik yang mereka ambil. Salah satu tokoh dalam pendekatan ini adalah James David Barber, ilmuwan politik yang menekankan

pentingnya kepribadian pemimpin dalam memengaruhi pola kepemimpinan selama masa jabatannya. Dalam Kegley & Wittkopf (1996), Barber menyatakan bahwa:

“President can be understood best by observing their ‘style’ (habitual ways of performing political roles), ‘world view’ (politically relevant beliefs)—and especially ‘character’— the way that President orients himself toward life—not for the moment, but for enduringly” (Zubaidah, 2021).

Dalam konteks ini, ada tiga faktor diyakini menjadi variabel utama yang menentukan perbedaan pendekatan antara Barack Obama dan Donald Trump dalam konflik Israel Palestina, yakni latarbelakang psikologis (analysis individual), lingkungan keluarga di mana mereka tumbuh (analysis individual & level group), dan dinamika domestic politics yang membentuk mental dan pola pikir yang juga berbeda.

Pertama adalah analysis individual, yang pada level ini terdapat beberapa variabel utama. Selain latar belakang atau biografi dari individu yang terlibat, variabel ini meliputi personality traits dan beliefs system. Personality traits sebagai karakter personal individu yang dapat membentuk cara individu dalam mengambil keputusan. Dalam kasus ini, karakter personal dari Presiden Barack Obama dan Donald Trump merupakan bagian dari variabel internal yang menjadi penentu dari arah kebijakan yang mereka buat, yang mana karakter personal tersebut terbentuk dari lingkungan keluarga tempat mereka tumbuh secara mental. Sementara itu, beliefs system, yang diartikan sebagai cara pandang seorang pemimpin tentang lingkungannya atau bagaimana mereka melihat ancaman dan dunia, yang kemudian mempengaruhi cara mereka menghadapi permasalahan.

Kedua adalah level group, di mana variabel yang terlibat adalah keberadaan individu lain yang memiliki hubungan paling dekat dengan aktor atau individu utama. Adapun level yang terakhir adalah dinamika domestic politics, yang menyangkut pada polarisasi politik/ideologi partai di Amerika Serikat.

Perbandingan Latar Belakang Barack Obama dan Donald Trump

Latar Belakang Barack Obama

Barack Hussein Obama atau yang lebih dikenal dengan nama Barack Obama merupakan Presiden ke-44, sekaligus presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat. Obama lahir di Honolulu, Hawaii pada 4 Agustus 1961. Obama merupakan putra dari pasangan suami istri dengan warna yang berbeda, yaitu Stanley Ann Dunham (Ibu) yang berdarah Inggris dan Barack Obama Sr. (Ayah) yang berdarah Muslim-Kenya. Kedua

orang tua Obama bercerai pada bulan Maret 1964. Lalu, Dunham menikah dengan laki-laki asal Indonesia bernama Lolo Soetoro, dan menetap bersama Obama kecil di Jakarta. Kemudian, Obama menempuh studi Hubungan Internasional dan Sastra Inggris di jurusan Ilmu Politik di Columbia University di New York. Ia melanjutkan pendidikannya ke program magister di Harvard Law School dan berhasil terpilih menjadi editor Harvard Law Review pada akhir tahun pertamanya sebagai mahasiswa.

Sebagai mahasiswa hukum, Obama memiliki banyak pengalaman sebagai aktivis di bidang hukum, terutama berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Obama beberapa kali juga bekerja di sejumlah firma hukum. Obama memulai karir legislatifnya pada tahun 1996 saat terpilih menjadi senat di Illinois hingga tahun 2007. Lalu setelahnya, Obama berhenti untuk fokus pada proses pemilihan umum sebagai perwakilan dari Partai Demokratik. Selama menjadi senat, Obama bergerak aktif dalam upaya penerapan HAM, khususnya pada kaum kulit hitam di Amerika Serikat.

Amerika Serikat mengalami penurunan terkait hubungannya dengan Israel pada periode pertama pemerintahan Presiden Barack Obama (Saltzman, 2017). Hal tersebut terlihat jelas dari perubahan sikap Gedung Putih yang dipimpin oleh Obama, sebagai aktor utama yang menjadi pemegang sentral dalam menyetir kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Obama lebih condong pada penggunaan pendekatan-pendekatan yang bertentangan dengan kepentingan Israel. Kerenggangan dan perselisihan yang terjadi antara Obama dan Netanyahu dipicu oleh adanya perubahan dalam model kebijakan Amerika Serikat yang dipilih oleh Obama yang lebih mengarah pada kelompok-kelompok liberal progresif di dalam pemerintahan. Keberadaan kelompok Kristen konservatif seperti kelompok-kelompok Christian Zionist Lobby kurang mendapatkan tempat dalam ruang politik domestik Obama, sama halnya dengan kelompok fundamentalis seperti AIPAC. Keadaan ini menempatkan Israel dan Netanyahu pada spektrum yang paling jauh dalam figur proksimitas aktor terhadap pembuat kebijakan. J Street, sebagai kelompok lobi yang bergandengan erat dengan Obama, menjadi salah satu aktor yang secara kohesif mendukung pemerintahan Obama untuk menciptakan kebijakan-kebijakan luar negeri yang lebih kritis dan progresif kepada publik (Diamond, 2014).

Berbagai inisiasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Kawasan Timur Tengah berpedoman pada pergerakan dalam politik domestik yang dilakukan oleh J Street dengan pendekatannya yang mengedepankan humanisme, dan penyelesaian masalah yang sesuai dengan agenda two-state solution, yang berusaha dicanangkan oleh Obama dalam upaya mencari jalan damai untuk konflik antara Israel dan Palestina. Di era pemerintahan Obama, J Street mampu memfasilitasi kebutuhan Obama dalam upayanya untuk menciptakan hubungan yang lebih sehat dengan Timur Tengah serta mengubah pandangan sentimental Amerika Serikat di kawasan tersebut. Selain itu,

posisinya di partai demokrat turut membentuk filosofi politik Obama yang sejalan dengan sudut pandang demokrat. Menurut Peter:

“Filsafat politik Obama didasarkan pada visi moral yang dibentuk oleh keyakinan agamanya sendiri sebagai penganut Kristen yang taat, pengalamannya sebagai organisator masyarakat, pemahamannya tentang hukum, dan seperangkat cita-cita demokrasi yang diabadikan dalam tradisi terbaik kehidupan politik Amerika dan dicontohkan dalam pidato-pidato Lincoln, Franklin D. Roosevelt, dan Kennedy – tiga presiden yang selalu ia sebut.”

Pada Juni tahun 2009, Obama memberikan pidato saat kunjungannya ke Mesir yang menentang tindakan kolonialisme yang diakui telah mengabaikan hak dan kesempatan kaum muslim, serta mengakui bahwa negara-negara dengan mayoritas muslim di dalamnya terlalu sering mendapat perlakuan tidak pantas dan tidak dianggap aspirasinya. Selain itu Obama juga menyoroti keadaan bangsa Palestina yang telah cukup lama menderita dan menyatakan akan memulai era baru dari hubungan Amerika Serikat dan dunia Islam yang dilandaskan pada persamaan kepentingan yang dimiliki oleh keduanya (Sahide, 2011).

Latar Belakang Donald Trump

Donald John Trump atau Donald Trump lahir pada 14 Juni 1946 di Queens, New York adalah anak ke-4 dari pasangan Fred Trump yang merupakan seorang pengembang property kelahiran Bronx yang merupakan imigran dari Jerman, dan Mary Anne Macleod Trump yang merupakan seorang imigran dari Skotlandia. Trump mendaftar di Universitas Fordham pada tahun 1964. Ia pindah ke Sekolah Wharton School of Finance and Commerce di Universitas Pennsylvania mulai tahun 1966 dan lulus dengan gelar Bachelor of Science dalam bidang ekonomi pada bulan Mei 1968. Sebagai seseorang yang lahir dari keluarga kaya raya, Trump yang dikenal dengan nama panggilan The Donald dijuluki sebagai raja bisnis Amerika, tokoh televisi, penulis, ketua, dan presiden dari The Trump Organization—yang ia ambil alih dari ayahnya pada tahun 1971—serta pendiri Trump Entertainment Resort. Trump tidak hanya berpusat pada bisnisnya di bidang real estate, namun juga mengembangkan sayapnya pada bisnis dalam berbagai bidang lainnya seperti Trump Airlines, Trump University, Trump Magazine, Trump Vodka, Trump Mortgage, dan Trump Steaks (Nareta, 2017)

Setelah kelulusannya, Trump bekerja di perusahaan milik ayahnya, The Trump Organization, yang berfokus pada bidang penyewaan rumah kelas menengah. Sebagai seorang pebisnis, Trump kerap kali dihadapkan pada situasi untung-rugi yang

melibatkan pihak lain, seperti proyek yang tidak berjalan sesuai target waktu, maupun masalah anggaran. Hingga puncaknya sepanjang periode waktu tahun 1990-an, Trump mengalami kerugian besar serta ancaman kebangkrutan sebagai dampak dari resesi. Namun dengan kemampuannya sebagai seorang pebisnis profesional, Trump berhasil melalui krisis tersebut. (Donald J. Trump, Founder The Trump Organization, 2024)

Trump memulai karir politiknya dengan mendaftar sebagai anggota Partai Republik pada tahun 1987, kemudian menjadi anggota dari Partai Kemerdekaan, lalu afiliasi dari Partai Reformasi negara bagian New York pada tahun 1999, Demokrat pada tahun 2001, lalu kembali pada Partai Republik pada tahun 2009, dan sempat tidak teafiliasi pada tahun 2011, yang kemudian kembali disatukan dengan Partai Republik pada tahun 2012. Trump melakukan penampilan pertamanya dalam bidang politik pada bulan Februari 2011 sebagai pembicara di Konferensi Aksi Politik Konservatif (CPAC) dengan menyampaikan pidato di negara bagian yang menyelenggarakan pemilihan pendahuluan awal. Pada tahun 2015, tepatnya di bulan Juni, Donald Trump mengumumkan pencalonannya sebagai perwakilan dari Partai Republik dalam kontestasi pemilihan umum Presiden Amerika Serikat.

Sejak masa kampanyenya Trump sudah dikenal akan sejumlah idenya, terkait bagaimana ia akan memimpin Amerika Serikat nantinya, yang tergolong kontroversial. Ketidaksukaan Trump terhadap imigran ilegal membuat Trump menuntut agar Meksiko membiayai pembangunan tembok besar di wilayah perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko. Ide pembangunan tembok ini merupakan Upaya Trump untuk mencegah adanya imigrasi ilegal dari Meksiko dan negara-negara Amerika Latin lainnya dikarenakan Trump berpendapat bahwa imigran ilegal menyebabkan kemiskinan dan tindak kriminal di Amerika Serikat (Hesson & Rosenberg, 2024; Sentner, 2024).

Selain anti imigran, Trump dalam berbagai statemennya juga mengindikasikan kebencian terhadap Islam. Kebencian tersebut mengantarkan persepsi di kalangan publik internasional bahwa Trump adalah seorang Islamophobia. Hal tersebut terlihat dengan jelas dalam setiap pidatonya yang secara keras mengecam umat Islam dan negara-negara Muslim (Patel & Levinson-Waldman, 2017). Slogan kampanye Trump yang sesuai dengan visi dan misi kepemimpinannya mengantarkan Trump pada upaya perbaikan sistem di dalam negeri dan restorasi kekuatan hegemoni Amerika Serikat di level dunia yang menjadi kunci dari kampanye Trump untuk menarik massa.

Selain itu, kekhawatiran masyarakat AS terhadap imigran dan terorisme juga dimanfaatkan oleh Trump untuk mengumpulkan suara (Terkel & Lebowitz, 2024; White, 2016). Sebagai orang yang juga secara terang-terangan menunjukkan kebenciannya terhadap Islam, Trump banyak menyelipkan unsur kekerasan dan rasisme dalam

pidatonya. Trump cenderung vocal terhadap isu Islam “radikal” dan terorisme, yang mengantarkan Trump tidak hanya pada keputusan untuk membatasi, bahkan melarang masuknya imigran yang berasal dari negara-negara Islam yang diduga menjadi asal dari terorisme, seperti Iran, Afghanistan, dan Yaman (Jacobs & Montoya-Galvez, 2025; FitzGerald, 2025).

Donald Trump telah menjalin hubungan baiknya dengan AIPAC sejak masa kampanyenya dengan mendatangi Pertemuan AIPAC pada 22 Maret 2016. Kedatangannya tersebut membuahkan hasil berupa dukungan AIPAC dengan mengatakan:

“... believe me. I came here to speak to you to speak where I stand on the future of American relations with our strategic ally, our unbreakable friendship and our cultural brother, the only democracy in the Middle East, the state of Israel” (Begley, 2016).

Pada 25 September 2016, sehari sebelum debat calon Presiden Amerika Serikat yang pertama digelar, Trump melangsungkan pertemuan dengan Benjamin Netanyahu untuk mendiskusikan hubungan antara AS dan Israel. Dalam diskusi tersebut juga dibahas mengenai bantuan militer, keamanan, dan stabilitas regional. Dalam masa transisinya sebelum secara resmi dilantik menjadi Presiden, Trump secara tegas memperlihatkan bahwa ia memiliki pandangan yang berbeda dengan Obama mengenai Israel dan Palestina. Perbedaan ini terlihat dari penolakan Trump terhadap Resolusi DK PBB 2334, bahkan sejak resolusi tersebut masih dalam bentuk rancangan (Riza, 2017). Selain itu, Trump juga berhasil melakukan intervensi terhadap keputusan Mesir melalui panggilan telepon pribadi dengan Presiden Abdel Fattah el-Sisi dan menekannya untuk menarik kembali draf awal Mesir di Dewan Keamanan (Lieber, 2017).

Refleksi Pendekatan Obama dan Trump dalam konflik Israel-Palestina

Meskipun AS di bawah Obama dan Trump memiliki tujuan strategis yang serupa dalam keterlibatannya di Timur Tengah, khususnya dalam konflik Israel–Palestina, tapi metode perumusan dan pendekatan kebijakan keduanya sangat berbeda. Obama mengedepankan pendekatan normatif dan diplomatik, yang tercermin dalam usahanya mendorong solusi dua negara dan kebijakan yang lebih seimbang. Sebaliknya, Trump menerapkan pendekatan yang konfrontatif dan sepihak, misalnya melalui pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pemindahan kedutaan besar AS, kebijakan yang menegaskan sikap pro-Israel secara eksplisit (The White House, 2017).

Pendekatan Trump sangat dipengaruhi oleh prinsip *America First*, yang tidak hanya mencerminkan nasionalisme ekonomi, tetapi juga mencerminkan orientasi unilateral dalam kebijakan luar negeri. Hal ini selaras dengan latar belakangnya sebagai pebisnis serta preferensi lingkaran dalamnya yang berorientasi pada keuntungan pragmatis dan aliansi strategis dengan kelompok-kelompok pro-Israel. Model kebijakan ini jelas bertolak belakang dengan pendekatan Obama yang lebih multilateral dan berbasis pada norma keadilan internasional.

Dalam konteks kontemporer, refleksi terhadap arah kebijakan luar negeri Trump menunjukkan konsistensi yang kuat dengan pola-pola yang telah ditunjukkan pada masa kepresidenan sebelumnya. Hingga saat ini, tidak terdapat perubahan signifikan dalam dimensi idiosinkratik Trump—baik dalam hal kebutuhan dominasi (*high need for power*), nasionalisme yang tinggi, maupun rendahnya kompleksitas kognitif. Dalam perkembangan terbaru konflik Palestina-Israel pada 2025, pendekatan Trump terbukti tidak mengalami perubahan. Trump dengan gaya pengambilan keputusannya yang khas cenderung menitikberatkan pada penyelesaian masalah secara unilateral. Salah satu contoh yang paling kontroversial adalah alih-alih membawa kedua pihak ke meja perundingan dan mendorong untuk mencapai *win-win solution*, Trump justru mengajukan wacana untuk memindahkan rakyat Palestina di wilayah Gaza ke negara lain, sebagai solusi untuk mengurangi korban jiwa. Langkah ini dinilai sebagai pengusiran terhadap penduduk Gaza, yang tempat tinggalnya justru dijadikan lahan pengembangan properti baru. Kasus ini juga merefleksikan bahwa pendekatan yang transaksional sangat mengakar kuat pada pendekatan AS dalam konflik Israel-Palestina, di mana pembuatan resolusi difokuskan pada pertimbangan untung rugi.

Idiosinkratik dalam Menjelaskan Faktor Internal yang Mempengaruhi Perbedaan Kebijakan Luar Negeri Barack Obama dan Donald Trump

Pada dasarnya, baik Barack Obama maupun Donald Trump memiliki latar belakang psikologis yang berbeda. Mengutip dari idiosinkratik yang dijelaskan oleh Warren bahwa aspek psikologis seperti intelegualitas, tempramen, moral, dan sikap yang dibangun selama perjalanan hidup seorang individu, menciptakan perbedaan pada orientasi kepribadian politiknya. Maka, perbedaan aspek psikologis antara Obama dan Trump dapat dikatakan sebagai faktor utama yang menjadi alasan dari perbedaan pada kepribadian politik keduanya.

Aspek psikologis ini secara lebih dalam terbentuk berdasarkan kondisi lingkungan tempat individu tersebut tumbuh baik secara jasmani, rohani, dan mental. Latar belakang dan perjalanan hidup Obama yang berangkat dari keluarga multirasial

serta hidup berpindah-pindah negara mulai dari Hawaii, Indonesia, Chicago, hingga Amerika Serikat juga pengalamannya yang pernah menempuh pendidikan di universitas terbaik dunia, turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap personalitasnya yang kemudian membentuk sudut pandang terhadap dunia. Ada beberapa indikator dalam idiosinkratik yang mendefinisikan perilaku-perilaku politik Barack Obama dan Donald Trump, yaitu:

Nasionalism

Sebagai seorang tokoh pemimpin, Obama mengartikan nasionalisme secara luas. Hal tersebut didasarkan pada keunikan yang berasal dari latar belakang multirasial dan warisan darah Muslim-Afrika dari ayahnya. Keakraban Obama dengan prinsip anti kolonialisme dan pengalamannya yang pernah menjalani hidup di negara berkembang telah membentuk pola pikir Obama ke arah yang lebih luas. Latar belakang historis tersebut menjadi modal utama yang dimiliki oleh Obama untuk menjalin hubungan Kerjasama serta berbaur dengan orang asing, yang mana hal tersebut dapat berguna khususnya dalam upaya penyelesaian masalah transnasional (Sikanku, 2013).

Sementara itu, Trump sebagai seorang pebisnis memandang nasionalisme sebagai sebuah kepentingan dan keuntungan yang harus diutamakan (Renshon, 2020). Hal tersebut terlihat dari bagaimana Trump yang mempertimbangkan untung-rugi dalam merangkai kebijakan luar negerinya, terutama dalam konflik Israel-Palestina. Kebutuhan Amerika akan peran Israel di Kawasan Timur Tengah untuk menjadi jembatan ke ladang minyak bumi terbesar di dunia membuat Trump tidak ragu untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri yang tergolong ekstrem dengan keberpihakannya pada Israel.

Trust of Others

Sebagai seseorang yang memiliki latar belakang karir di bidang hukum dan politik, serta keluarga multirasialnya, Obama memiliki toleransi yang tinggi terhadap keberagaman dunia, juga tingkat kecurigaan yang rendah. Pengalamannya selama menjadi senator turut memberikan peranan dalam membentuk kepribadian politik Obama yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya, serta kemampuan Obama untuk mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan tanpa membeda-bedakannya (Hammack, 2010).

Donald Trump sementara itu menunjukkan karakteristik kepribadian politik yang cenderung transaksional. Trump dikenal hanya membangun relasi dengan individu atau kelompok yang memberikan keuntungan strategis bagi dirinya, baik secara politik maupun personal. Sikap ini mencerminkan tingkat toleransi yang lebih rendah terhadap pandangan yang berbeda, juga kecenderungan untuk menunjukkan kecurigaan terhadap kelompok atau pihak yang tidak sejalan dengan kepentingan politiknya.

McAdams (2016) menggambarkan Trump sebagai sosok yang memiliki gaya hubungan sosial pragmatis yang sangat transaksional, di mana kesetiaan dan keuntungan menjadi perhatian utama dalam menjalin afiliasi. Selain itu, karakter kepribadiannya juga ditandai oleh motivasi kekuasaan yang tinggi dan kebutuhan afiliasi yang rendah (Winter, 2011). Karakteristik ini diperkuat oleh kecenderungan Trump untuk mengabaikan masukan dari pihak yang tidak loyal, serta kecenderungannya untuk mengganti pembantu atau penasihat politik yang tidak mendukung agendanya (Barber, 1992).

Believe in Control

Kategori ini menggambarkan rendahnya keinginan Obama untuk dominasi dan mengambil kendali. Obama bukan merupakan seorang pemimpin yang berambisi dengan power dan negara yang dipimpin olehnya. Obama memiliki kecenderungan untuk mendorong partisipasi dari pihak lain dibandingkan berusaha untuk meraih kemenangan sendiri dalam upayanya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Latar belakang karir dan Pendidikan Obama yang berporos pada bidang hukum membentuk kepribadian politik Obama yang adil. Hal tersebut tercermin dalam sikap Obama yang berusaha mendudukan Netanyahu dan Mahmoud Abbas dalam meja perundingan untuk mendiskusikan jalan keluar dari konflik Israel-Palestina (Nandareska, 2018)

Trump di sisi lain, yang tumbuh di keluarga pebisnis selama bertahun-tahun, membuatnya terbiasa memegang kendali penuh atas segala hal yang ada di bawahnya. Hal ini juga membentuk kepribadian politik Trump yang dominatif (Immelman & Griebie, 2020). Hal ini tergambarkan dalam kebijakan Trump yang secara sepihak memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Jerusalem. Selain itu, upaya Trump untuk membungkam dukungan dari negara-negara berkembang lain dengan menggunakan ancaman ekonomi agar negara-negara tersebut tidak memberi dukungan kepada Palestina, juga membuktikan sifat dominasi dan keinginan kuat akan kepemilikan power yang dimiliki Trump yang terbentuk dari lingkungannya sebagai pebisnis.

Need for Affiliation

Obama kerap kali melibatkan banyak pihak dalam bekerja, yang tercerminkan pada saat Obama bekerja sebagai direktur dari sebuah organisasi komunitas berbasis gereja bernama Developing Communities Project terhitung sejak Juni 1985 hingga Mei 1988. Selain itu Obama juga bekerja dalam sebuah lembaga pengorganisasian komunitas bernama Gamaliel Foundation sebagai konsultan dan instruktur. Obama memimpin proyek pembangunan kawasan kumuh dan miskin dengan memberdayakan sebuah organisasi serta melibatkan berbagai tokoh masyarakat (Bloodworth, 2022).

Sebagai seorang yang berkecimpung di dunia bisnis sepanjang hidupnya, Trump saat memasuki dunia politik tidak mengenal dengan baik orang-orang di dalamnya. Untuk membentuk afiliasinya sendiri, Trump membawa orang-orang terdekatnya untuk mendampingi di kursi pemerintahan, seperti menantu dan pengacara yang biasa membantunya. Selain itu, sikap Trump yang mencerminkan kategori ini juga terlihat dari Trump yang langsung mengunjungi kantor AIPAC saat masa kampanye. Hal tersebut menunjukkan bahwa Trump berusaha menjalin afiliasi dengan kaum Yahudi guna meraih dukungan suara (Destiana, 2024).

Conceptual Complexity

Sebagai individu, Obama memiliki tingkat kompleksitas konseptual yang tinggi. Hal tersebut terlihat dari kemampuannya dalam mencari solusi alternatif dalam kondisi terbatas sekalipun yang tercermin dari beberapa kebijakan yang diambil Obama dalam upayanya mencari jalan keluar dari konflik Israel-Palestina. Hal tersebut berdasar pada historical background yang dimilikinya, seperti saat Obama berusaha mencari jati dirinya di Tengah lingkungan keluarga yang beragam dan membingungkan (Feldman & Shikaki, 2009).

Trump di sisi lain tergolong ke dalam pemimpin yang memiliki tingkat kompleksitas konseptual rendah, yang menempatkan Trump digolongkan sebagai pemimpin dengan kemampuan untuk menyadari metode alternatif yang rendah (Siniver & Featherstone, 2020). Hal ini didasarkan oleh latar belakangnya yang merupakan seorang pebisnis yang memandang semua isu atau permasalahan berdasarkan sudut pandang untung-rugi, yang berarti cakupan yang tergolong sempit untuk seorang pemimpin. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menjadi lebih masuk akal mengapa proposal damai yang dirancang oleh Trump sangat dominan kepada kepentingan Israel dan merugikan Palestina. Hal ini karena keberadaan Israel yang jauh

lebih menguntungkan bagi Trump dan Amerika Serikat untuk memenuhi kepentingannya.

Political Afiliation

Baik Obama maupun Trump sama-sama berasal dari dua kelompok politik yang berbeda. Obama adalah seorang demokrat liberal-kiri, sedangkan Trump berasal dari konservatif sayap kanan. Perbedaan ini juga turut menciptakan perbedaan kuat dalam pengambilan kebijakan keduanya. Obama sebagai seorang politisi yang tumbuh dari bawah mempelajari situasi dan seringkali sejalan dengan lingkungan partainya. Jadi dapat dikatakan bahwa Obama benar merepresentasikan ideologi Partai Demokrat di panggung internasional, dengan menggunakan pendekatan yang lebih soft dan humanitarian oriented, dimana perilaku tersebut sejalan dengan ideologi demokrat sebagai partai yang mengarah pada perilaku kooperatif, humanitarian oriented, mendukung multilateralisme. Obama berpikir dengan perspektif yang lebih luas, dalam pengertian benar-benar *thick into account* atau sesuai dengan ideologi kebijakan luar negeri dari demokratik (Zubaidah & Hernintyas, 2021).

Sementara itu, Trump pada periode pertamanya, justru dimusuhi oleh partainya sendiri dan sering berselisih dengan pemimpin senat Partai Republikan (Ware, 2016). Hal itu menunjukkan sikap abai Trump terhadap partainya sendiri yang berarti bahwa latarbelakangnya sebagai perwakilan dari Partai Republik tidak memberikan pengaruh besar terhadap keputusannya sebagai decision maker, dan justru cenderung tidak memiliki pengaruh sama sekali apabila dilihat dari perilaku politik Trump yang sangat agresif dalam pengambilan keputusan. Sebagian ahli menyatakan bahwa meski Partai Republik adalah penganut sayap kanan garis keras, namun Trump yang menjadi anggota dari partai tersebut ternyata lebih ekstrem sebagai penganut sayap kanan, hingga perilaku politiknya tidak dapat dikendalikan oleh partainya sendiri.

Simpulan

Di balik perubahan model kebijakan luar negeri Amerika Serikat dari era Barack Obama ke Donald Trump, tentu terdapat faktor-faktor mendasar yang memengaruhinya. Dalam konteks ini, faktor internal diyakini menjadi variabel utama yang menentukan perbedaan orientasi dan pendekatan kebijakan keduanya. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan latar belakang psikologis dan lingkungan keluarga tempat keduanya tumbuh, yang kemudian membentuk karakter serta pola pikir politik yang berbeda. Dengan menggunakan pendekatan idiosinkratik, penelitian ini

menitikberatkan pada faktor internal yang terdiri dari individual level, mencakup personality traits dan belief systems, serta group level, yang merujuk pada lingkaran terdekat presiden. Teori idiosinkratik, yang menempatkan aspek psikologis sebagai indikator utama dalam pengambilan keputusan pemimpin, membantu menjelaskan mengapa terdapat perbedaan mendasar dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap konflik Israel–Palestina antara kedua presiden tersebut.

Dalam kasus ini, karakter personal Barack Obama dan Donald Trump merupakan faktor internal utama yang membentuk arah kebijakan luar negeri mereka. Trump, yang berasal dari keluarga pebisnis kaya, menunjukkan karakter yang keras, kompetitif, dan cenderung impulsif. Ia dikenal sebagai figur yang straightforward, yang berarti cenderung bertindak tanpa pertimbangan panjang. Sebaliknya, Obama dibesarkan dalam keluarga akademis dengan latar belakang multikultural dan pernah tinggal di berbagai negara, yang membentuk kepribadian yang toleran, reflektif, dan humanis.

Pada group level, individu-individu terdekat juga memainkan peran penting dalam membentuk preferensi kebijakan. Trump, yang tidak memiliki pengalaman politik sebelum menjabat, cenderung mengandalkan lingkaran dalam yang terdiri dari orang-orang kepercayaannya di dunia bisnis. Hal ini menciptakan pendekatan kebijakan yang lebih eksklusif dan kurang mengakar pada tradisi diplomatik formal. Sebaliknya, Obama, dengan pengalaman sebagai senator dan keterlibatan dalam proses legislasi, memiliki jaringan politisi dan penasihat kebijakan yang lebih mapan. Hal ini membuatnya lebih mampu beradaptasi dalam birokrasi dan mengembangkan pendekatan kebijakan yang sejalan dengan ideologi Partai Demokrat.

Daftar Pustaka

Barber, J. D. (1992). *The presidential character: Predicting performance in the White House* (4th ed.). New York: Routledge.

Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. (2020). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.

Begley, S. (2016, Maret 21). Read Donald Trump's Speech to AIPAC. Retrieved from TIME: <https://time.com/4267058/donald-trump-aipac-speech-transcript/>

Bloodworth, J. (2022). Almost, Maybe, Kinda, Transformational: Barack Obama. Dalam M. Grossman, R. E. Matthews, & F. Schortgen, *Achievements and Legacy of the*

- Obama Presidency (hal. 15-30). Cham: Palgrave Macmillan Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-89529-7_2.
- Darmawan, A. B. & Utami, A. T. (2024). *Dinamika Politik Luar Negeri Amerika Serikat: Antara Kekuasaan, Perang, dan Diplomasi*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Destiana, C. Z., Rachmat, A. N., & Nastiti, N. N. (2024). IDIOSINKRATIK DONALD TRUMP DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP KRISIS KEMANUSIAAN DI VENEZUELA TAHUN 2017-2021. *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*,
- Diamond, J. (2014, 24 Juli). J Street challenges the Israel lobby from within. CNN [online]. Dalam: <https://edition.cnn.com/2014/07/24/politics/j-street-israel-lobby> [Diakses 9 Mei 2025].
- Elgot, J. (2009, 14 Juli). Obama's pledge to US Jews. *The Jewish Chronicle* [online]. Dalam: <https://www.thejc.com/news/world/obamas-pledge-to-us-jews-f4szpfis> [Diakses 9 Mei 2025].
- Feldman, P., & Shikaki, K. (2009). The Obama Presidency and the Palestinian-Israeli Conflict. *Palestinian Center for Policy and Survey Research* [online]. Dalam: <https://www.pcpsr.org/sites/default/files/obamapresidencykhilshai.pdf> [Diakses 23 Januari 2025].
- Firdaus, A. Y. & Yani, Y. M. (2020). Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina-Israel. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 104-110.
- FitzGerald, J. (2025). Why are these 12 countries on Trump's travel-ban list? BBC [online]. Dalam: <https://www.bbc.com/news/articles/cz6329yvwdvo> [Diakses 11 Mei 2025].
- Forgey, Q. (2018, 22 Oktober). Trump: 'I'm a nationalist'. *Politico* [online]. Dalam: <https://www.politico.com/story/2018/10/22/trump-nationalist-926745> [Diakses 9 April 2025].
- Hammack, P. (2010). The Political Psychology of Personal Narrative: The Case of Barack Obama. *Analyses of Social Issues and Public Policy*, 10(1), 182-206.
<https://doi.org/10.1111/J.1530-2415.2010.01207.X>.
- Hesson, T. & Rosenberg, M. (2024, 16 Juli). Trump says migrants are fueling violent crime. Here is what the research shows. *Reuters* [online]. Dalam: <https://www.reuters.com/world/us/trump-focuses-migrants-crime-here-is-what-research-shows-2024-04-11/> [Diakses 5 Mei 2025].

- Immelman, A., & Griebie, A. (2020). The Personality Profile and Leadership Style of U.S. President Donald J. Trump in Office. [online]. Dalam: https://www.researchgate.net/publication/343400256_The_Personality_Profile_and_Leadership_Style_of_US_President_Donald_J_Trump_in_Office/citations [Diakses 20 Januari 2025].
- Jacobs, J. & Montoya-Galvez. (2025, 5 Juni). Trump signs travel ban on nationals from 12 countries, restrictions on 7 more. CBS News [online]. Dalam <https://www.cbsnews.com/news/trump-signs-travel-ban-multiple-countries/> [Diakses 10 Mei 2025].
- Khan, Z., & Mehdi, A. (2023). Influence of the Israeli Lobby on the Foreign Policy of the USA. *Electronic Research Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(11), 63-77.
- Lieber, D. (2017, 5 Desember). Trump phones Sissi on Jerusalem moves as Abbas rallies world to intervene. *The Times of Israel* [online]. Dalam: <https://www.timesofisrael.com/trump-phones-sissi-on-jerusalem-moves-as-abbas-rallies-world-to-intervene/> [Diakses 10 Mei 2025].
- Sebayang, R. (2020, 29 Januari). Ini Isi Proposal Damai Trump-Israel Buat Negara Palestina. *CNBC Indonesia* [online]. Dalam: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200129124657-4-133621/ini-isi-proposal-damai-trump-israel-buat-negara-palestina> [Diakses dari 20 Januari 2025].
- Munayyer, Y. (2020, 11 November). The Trump Term: An Israel-Palestine Damage Assessment. *Arab Center Washington D.C* [online]. Dalam: <https://arabcenterdc.org/resource/the-trump-term-an-israel-palestine-damage-assessment/> [Diakses 11 Mei 2025].
- McAdams, D. P. (2016, June). The mind of Donald Trump. *The Atlantic* [online]. Dalam: <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/06/the-mind-of-donald-trump/480771/> [Diakses 13 Mei 2025].
- Nandareska, I. V., & Windiani, R. (2018). Implikasi Idiosinkratik Barack Obama terhadap Kebijakan Kerjasama Kontraterorisme Amerika-Arab Saudi. *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, 4(3), 589-596.
- Nareta, A. A. (2017). Kegagalan Trump dalam Konflik Israel-Palestina. *Academia* [online]. Dalam: https://www.academia.edu/35629036/Kegagalan_Trump_dalam_Konflik_Israel_Palestina [Diakses 21 Januari 2025].

- Obama, B. (2015, 30 April). Presidential Proclamation --Jewish American Heritage Month, 2015. The White House [online]. Dalam: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/04/30/presidential-proclamation-jewish-american-heritage-month-2015> [Diakses 10 April 2025].
- Paat, V. E. (2013). Posisi Amerika Serikat dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 1-9.
- Patel, F. & Levinson-Waldman, R. (2017, 19 April). The Islamophobic Administration. Brennan Center for Justice [online]. Dalam <https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/islamophobic-administration> [Diakses 11 Mei 2025].
- PBS News Hour. (2017, 16 Februari). Does Trump's confrontational style help him as president? PBS News [online]. Dalam: <https://www.pbs.org/newshour/show/trumps-confrontational-style-help-president> [Diakses 19 Mei 2025].
- Pressman, J. (2016, 14 Juli). Obama and the Israeli-Palestinian Conflict. *E-International Relations* [online]. Dalam: <https://www.e-ir.info/2016/07/14/obama-and-the-israeli-palestinian-conflict/> [Diakses 23 Januari 2025].
- Renshon, S. (2020). The Trump Doctrine and Conservative American Nationalism. Dalam S. A. Renshon & P. Suedfeld, *The Trump Doctrine and the Emerging International System* (hal. 3-38). Cham: Palgrave Macmillan Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45050-2_1.
- Riza, B. (2017, 8 Desember). Ini 9 Resolusi PBB Soal Yerusalem yang Dilanggar Trump. *Tempo* [online]. Dalam: <https://www.tempo.co/internasional/ini-9-resolusi-pbb-soal-yerusalem-yang-dilanggar-trump-1020051> [Diakses 25 Januari 2025].
- Sahide, A. (2011). Obama dan Kultur Kepemimpinan Gedung Putih. *Jurnal Kawistara*, 1(3), 213-303.
- Saltzman, I. Z. (2017). Not So "Special Relationship"? US-Israel Relations During Barack Obama's Presidency. *Israel Studies*, 22(1), 50-75.
- SBS News. (2015, 24 Februari). Obama committed to Palestinian state. SBS Australia [online]. Dalam: <https://www.sbs.com.au/news/article/obama-committed-to-palestinian-state/rk7inju9c> [Diakses 10 Juni 2025].
- Sentner, I. (2024, 2 November). Trump says migrants caused a 'surge in crime' in a small Wisconsin city. Its residents reject that. *Politico* [online]. Dalam:

<https://www.politico.com/news/2024/11/02/trump-candidacy-false-migrant-invasion-00186875> [Diakses 11 Mei 2025].

Siniver, A., & Featherstone, C. (2020). Low-conceptual complexity and Trump's foreign policy. *Global Affairs*, 6(1), 71 - 85.
<https://doi.org/10.1080/23340460.2020.1734953>.

Sikanku, G. (2023). The Obama creed in retrospect: Communicative frames and representations from an Afrocentric perspective. *Communication and the Public*, 8(4), 324-342. <https://doi.org/10.1177/20570473231195919>.

Terkel, A. & Lebowitz, M. (2024, 19 September). From 'rapists' to 'eating the pets': Trump has long used degrading language toward immigrants. NBC News [online]. Dalam <https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-degrading-language-immigrants-rcna171120> [Diakses 11 Mei 2025].

The White House (2017, 23 Mei). Remarks by President Trump and President Abbas of the Palestinian Authority in Joint Statements. Dalam: <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-president-abbas-palestinian-authority-joint-statements/> [Diakses 23 Januari 2025].

Trump, D. J. (2024). Founder The Trump Organization. The Trump Organization [online]. Dalam: <https://www.trump.com/leadership/donald-j-trump-biography> [Diakses 23 Februari 2025].

Ware, A. (2016). Donald Trump's Hijacking of the Republican Party in Historical Perspective. *The Political Quarterly*, 87(3), 406-414. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.12275>.

White, D. (2016, 15 Agustus). Read Donald Trump's Ohio Speech on Immigration and Terrorism. TIME [online]. Dalam: <https://time.com/4453110/donald-trump-national-security-immigration-terrorism-speech/> [Diakses 10 Mei 2025].

Winter, D. G. (2011). Political psychology and foreign policy. Dalam D. O. Sears, L. Huddy, & R. Jervis (Eds.), *The Oxford handbook of political psychology* (2nd ed., hal. 591–635). Oxford: Oxford University Press.

Yani, Y. M. (2010). Politik Luar Negeri. Pustaka Unpad [online]. Dalam: https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/01/politik_luar_negeri.pdf [Diakses 20 Januari 2025].

Zubaidah, A. A., & Herningtyas, R. (2021). Conciliator VS Bloc Leader: Perbandingan Kebijakan Barack Obama & Donald Trump dalam Merespon Pertumbuhan Ekonomi China. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 3(2), 127-140.